

**PENGARUH FAKTOR UMK, BELANJA
PEMERINTAH DAERAH, INVESTASI
SWASTA, SERTA INFLASI TERHADAP PDRB
DAN POSISI PEREKONOMIAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2010-2015**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**VENIA KUSUMA PUTRI
12020113140074**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Venia Kusuma Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 12020113140074

Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **PENGARUH FAKTOR UMK, BELANJA
PEMERINTAH DAERAH, INVESTASI
SWASTA, SERTA INFLASI TERHADAP
PDRB DAN POSISI PEREKONOMIAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2010-2015**

Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana,S.E.,M.Si.

Semarang, 7 Juni 2017
Dosen Pembimbing,

(Dr. Hadi Sasana,S.E.,M.Si)
NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Venia Kusuma Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 12020113140074
Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **PENGARUH FAKTOR UMK, BELANJA
PEMERINTAH DAERAH, INVESTASI
SWASTA, SERTA INFLASI TERHADAP
PDRB DAN POSISI PEREKONOMIAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2010-2015**

Telah Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 13 Juni 2017

Tim Penguji :

1. Dr. Hadi Sasana, S.E.,M.Si. (.....)
2. Drs. Edy Yusuf AG, Msc.,Ph.D. (.....)
3. Nenek Woyanti, S.E., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Venia Kusuma Putri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH FAKTOR UMK, BELANJA PEMERINTAH DAERAH, INVESTASI SWASTA, DAN SERTA INFLASI TERHADAP PDRB DAN POSISI PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Juni 2017
Yang membuat pernyataan

Venia Kusuma Putri
NIM 12020113140074

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” – Mae West

“People aren’t either wicked or noble. They’re like chef’s salads, with good things and bad things chopped and mixed together in a vinaigrette of confusion and conflict.” – Lemony Snicket

ABSTRAK

Terwujudnya kesejahteraan merupakan salah satu sasaran pembangunan baik nasional maupun daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian serta pembangunan ekonomi suatu daerah adalah PDRB. PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 tergolong rendah, namun ketimpangan juga rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB .

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi PDRB. Sedangkan untuk menganalisis posisi perekonomian menurut Tipologi Klassen menggunakan analisis deskriptif dan metode regresi Logistik Multinomial. Dengan menggunakan Tipologi Klassen dapat diketahui posisi perekonomian masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tiap tahun untuk tahun 2010-2015

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel UMK, Belanja pemerintah daerah, dan Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, sedangkan variabel Investasi swasta tidak signifikan. Faktor yang berpengaruh terhadap posisi perekonomian berdasarkan hasil regresi Multinomial Logistik adalah variabel Belanja pemerintah daerah terhadap posisi daerah berkembang cepat.

Kata Kunci: PDRB,tipologi klassen, UMK, Belanja Pemerintah, Investasi Swasta, inflasi, multinomial logistik

ABSTRACT

Establishment of welfare is one of either regional or national development aim to achieved. And one of the indicators that can be used to know the condition of economy and development is PDRB. PDRB of Central Java in 2010-2015 is low, but the gap is also low. So the purpose of yhis study is to find out the factors that affect the PDRB and the economic position of Regency/Municipality of Central Java 2010-2015.

This study used secondary data with panel data regression analysis Fixed Effect Model (FEM) to find out factors that affect PDRB. Meanwhile, to analyze the economic position according ro Klassen's Typology using descriptive analysis and Multinomial Logistic regression method. Using Klassen's Typology can be known the economic position of each Regency/Municipalityof Central Java Province each year from 2010 until 2015.

Based on the result of the research indicate that variabel UMK, Total Realization of Local Government Expenditure, and Inflation have significant positive effect to PDRB of Regency/Municipality of Central Java, while Total Realization of Private Investment is not significant. Factor that affect the economic position based on the result of multinomial logistic regression is variabel Total Realization of Local Government Expenditure.

Keywords: *PDRB, typology klassen, UMK, Local Government Expenditure, Private Investment, Inflation, Multinomial Logistic*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan izin yang telah diberikan kepada saya, untuk menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

1. Saya sangat berterimakasih kepada kedua orangtua dan keluarga saya yang selalu ada dan selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materiil hingga saya bisa sampai seperti ini.
2. Terimakasih kepada bapak Dr.Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan FEB Undip yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh studi di FEB Undip.
3. Terimakasih kepada bapak Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D selaku Ketua Departemen IESP atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama menempuh menjadi mahasiswa.
4. Terimakasih kepada bapak Hadi Sasana, Dr.,S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau atas bimbingan serta dukungan selama penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi.
5. Terimakasih kepada seluruh dosen serta staff departemen IESP FEB Undip yang telah memberikan ilmunya serta memberikan fasilitas yang amat bermanfaat bagi saya.
6. Terimakasih kepada seluruh teman-teman IESP angkatan 2013, adik angkatan serta kakak angkatan.
7. Terimakasih kepada seluruh anggota HMJ IESP 2015 yang telah memberikan saya pengalaman untuk ber organisasi dan melatih saya untuk lebih bertanggung jawab dalam segala hal.
8. Terimakasih kepada Cuhubud Novia, Nurul, Chun, Olip, Neily, Kiki, Lila yang telah menemani dan saling membantu selama masa perkuliahan.
9. Terimakasih kepada teman-teman saya yang mana sedari SMP sudah bersama untuk Andriana Hestiyani, Pinastika Larasati, Poppy Yoananda, Nisitiya Mahisi U.M, Pramudya Sukma, Chadella Andini, Fisa Savanti.

10. Terimakasih kepada teman-teman SMA saya untuk Edwina, Novida Widarani, Risandi Aji P.
11. Terimakasih kepada Denny Agung Hariyanto karena telah menemani dan selalu memberikan semangat kepada saya selama saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Ibnu yang telah banyak membantu dalam proses olah data dalam skripsi saya.
13. Terimakasih kepada Tim KKN II Desa Dermolo untuk Tea, Sarah, Mega , Meta, Erwin, dan Rico.
14. Semua pihak yang telah membantu dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat diucapkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari skripsi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 7 Juni 2017

Penulis,

Venia Kusuma Putri

12020113140074

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Pustaka	18
2.1.1 PDRB.....	18
2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik.....	20
2.1.1.2 Model Pertumbuhan Agregat	21
2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory)	22
2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	23
2.1.2 Posisi Perekonomian.....	24

2.1.3	Upah Minimum Kerja/ Upah Minimum Regional	25
2.1.4	Pengeluaran/Belanja Pemerintah	27
2.1.5	Investasi	32
2.1.5.1	Teori Neo Klasik	34
2.1.5.2	Teori Harrod-Domar	35
2.1.6	Inflasi	35
2.2	Hubungan Variabel Terikat Terhadap Variabel Tidak Terikat	39
2.2.1	Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap PDRB Kabupaten/Kota	39
2.2.2	Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap PDRB Kabupaten/Kota.....	40
2.2.3	Hubungan Investasi swasta terhadap PDRB Kabupaten/Kota	40
2.2.4	Hubungan inflasi terhadap PDRB Kabupaten/Kota	41
2.2.5	Hubungan UMK, belanja pemerintah daerah, investasi swasta, dan inflasi terhadap posisi perekonomian Kabupaten/Kota	41
2.3	Studi Terdahulu	42
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis	48
2.5	Hipotesis.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....		51
3.1	Jenis Dan Sumber Data	51
3.2	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	51
3.3	Metode Pengumpulan Data	53
3.4	Teknik Analisis	54
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	59
3.4.2	Analisis Regresi.....	54

3.4.2.1	Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Penggunaan Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variable (LSDV).....	54
3.4.2.2	Regresi Logistik Multinomial	60
3.4.3	Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.....	61
3.4.3.1	Uji Multikolinearitas	61
3.4.3.2	Uji Normalitas	62
3.4.3.3	Heterokedastisitas	62
3.4.3.4	Uji Autokorelasi	62
3.4.3.5	Metode <i>Newey-West</i> untuk memperbaiki standard error OLS....	63
3.4.4	Uji Signifikansi.....	63
3.4.4.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	63
3.4.4.2	Uji Hipotesis (Uji t).....	64
3.4.4.3	Uji Simultan (Uji F)	64
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	66
4.1.1	Gambaran Umum	66
4.1.2	Kondisi Perekonomian Jateng	67
4.1.2.1	PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	68
4.1.2.2	Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	70
4.1.2.3	Belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	72
4.1.2.4	Investasi swasta Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	74
4.1.2.5	Inflasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	76
4.2	Hasil Penelitian dan Analisis PDRB	78
4.2.1	Deskripsi statistik	78

4.2.2 Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	79
4.2.2.1 Multikolinearitas	79
4.2.2.2 Normalitas	80
4.2.2.3 Heterokedastisitas	81
4.2.2.4 Autokorelasi	82
4.2.3 Hasil Uji Statistik Analisis Regresi	83
4.2.3.1 R^2	83
4.2.3.2 Uji t	84
4.2.3.3 Uji F	86
4.2.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan PDRB	87
4.3 Hasil Penelitian dan Analisis Posisi Perekonomian.....	94
BAB V PENUTUP.....	104
5.1 Simpulan	104
5.2 Keterbatasan.....	105
5.3 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB dan PDRB perkapita masing-masing Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015 (dalam Juta rupiah).....	5
Tabel 1.2 Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015.....	8
Tabel 2.1 Studi Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	52
Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam juta rupiah).....	68
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik	78
Tabel 4.4 Korelasi antar variabel independen.....	79
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas (Jarque-Bera)	80
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser	81
Tabel 4.8 Hasil Uji LM	83
Tabel 4.10 Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015.....	96
Tabel 4.11 Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas Terhadap Posisi Perekonomian	98
Tabel 4.12 Hasil Estimasi Model Regresi Logistik Multinomial	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Matriks Tipologi Klassen	9
Gambar 2.1 Kurva Ketimpangan Wilayah Hipotesis Neo Klasik.....	24
Gambar 2.2 Matriks Tipologi Klassen	25
Gambar 2.3 Kurva Teori Peacock dan Wiseman	31
Gambar 2.4 Kurva Bird.....	32
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis	49
Gambar 4.1 Peta Geografis Provinsi Jawa Tengah.....	67
Gambar 4.2 Sebaran Rata-rata Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Menurut Tipologi Klassen Tahun 2010-2015	97

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 GDP Negara ASEAN-5 Tahun 2010-2015 (dalam miliar US\$)	3
Grafik 4.1 Rata-Rata Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam Juta rupiah)	69
Grafik 4.2 Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam rupiah)	71
Grafik 4.3 Rata-rata Belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam miliar rupiah)	73
Grafik 4.4 Rata-rata Investasi swasta Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam juta rupiah)	75
Grafik 4.5 Rata-rata Inflasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam persen)	77

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Data Penelitian	111
LAMPIRAN B Hasil Penelitian.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu sasaran dan misi pembangunan nasional menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2000, dimana terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Todaro (2000) mengatakan selain kesejahteraan masyarakat, paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen tersebut adalah (1) kecukupan (*sustenance*), (2) jati diri (*self-esteem*), (3) kebebasan (*freedom*).

Menurut Rahman dan Chamelia (2015) salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro serta keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu diperlihatkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) untuk suatu Negara dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota. Nilai PDB maupun PDRB dapat juga menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah tersebut dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang terdapat dalam daerah tersebut.

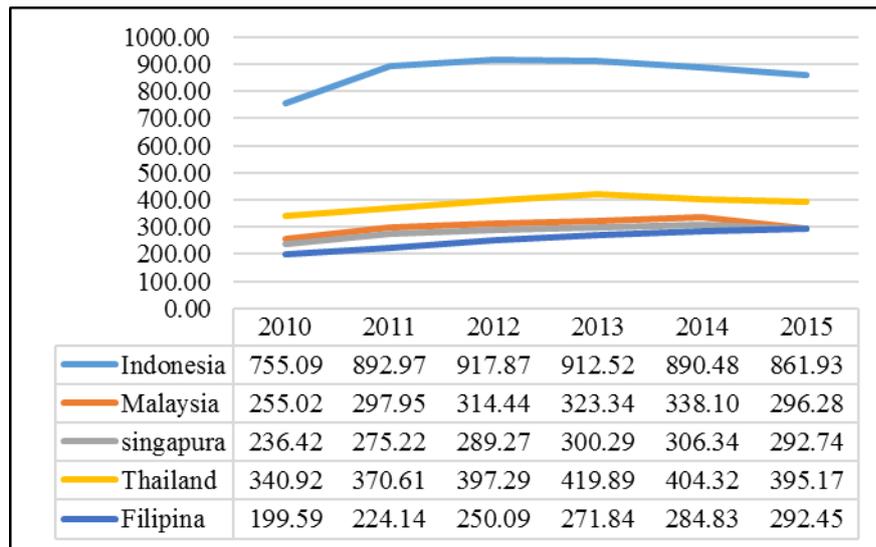
Seperti yang dikatakan oleh Mankiw (2000) Produk Domestik Bruto (PDB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu Negara. PDB mampu untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Nilai dari PDB mengandung dua macam persepsi yaitu sebagai perekonomian total dari setiap orang didalam suatu perekonomian dan sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa dalam perekonomian.

Grafik 1.1 memperlihatkan GDP tahun 2010-2015 negara-negara yang tergabung dalam ASEAN-5 diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. GDP Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 4 negara pendiri ASEAN lainnya. Lalu, di tempat kedua dengan GDP tertinggi diantara negara-negara ASEAN-5 adalah Thailand, GDP tertinggi yang dicapai oleh Thailand untuk tahun 2010-2015 hanya sebesar US\$ 419,89 miliar pada tahun 2013, jauh berada dibawah GDP Indonesia pada tahun yang sama mencapai US\$ 912,52 miliar. Dan negara dengan GDP ter rendah adalah Filipina, GDP tertinggi yang dicapai oleh Filipina hanya sebesar US\$ 292,45 pada tahun 2015 dan ter rendah sebesar US\$ 199,59 miliar pada tahun 2010, dimana angka tersebut merupakan angka GDP ter rendah diantara negara ASEAN 5 lainnya.

Namun secara keseluruhan GDP di negara-negara ASEAN-5 tersebut tidak mengalami naik turun secara tajam, yang berarti perekonomian negara-negara tersebut cenderung stabil untuk tahun 2010 hingga 2015. Hanya pada tahun 2015 empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand mengalami penurunan GDP yang diyakini diakibatkan karena belum adanya fundamental

perekonomian yang cukup mapan bagi negara-negara kawasan untuk memasuki kompetisi perekonomian yang lebih terbuka pada tahun 2015 tersebut.

Grafik 1.1
GDP Negara ASEAN-5 Tahun 2010-2015 (dalam miliar US\$)



Sumber: World Bank.(berbagai tahun)

Disamping pembangunan secara nasional di Indonesia yang telah berlangsung secara baik pada tahun 2010 hingga 2015 yang ditandai dengan pencapaian GDP yang tinggi tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi regional belum tentu berjalan secara baik seperti pembangunan ekonomi nasional. Beberapa daerah mengalami pembangunan dengan cepat, sedangkan daerah lainnya mengalami pembangunan yang lebih lambat.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah relatif maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*). (Sjafrizal, 2012).

Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi yang ditimpulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat (Sjafrizal, 2012). Menurut Firdaus (2013), fakta empirik dan beberapa studi menunjukkan ketimpangan antar wilayah di Indonesia semakin mengemuka sejak pertengahan tahun 1995 sampai dengan sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama sejak 2005. Utamanya pada saat mulai berlakunya sistem otonomi dan desentralisasi fiskal yang diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2001.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 14 menyebutkan bahwa kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara singkatnya dengan sistem otonomi dan desentralisasi fiskal tersebut pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri daerahnya. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan daerah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunannya setelah pelaksanaan otonomi daerah

melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah yang bersangkutan (Rahman dan Chamelia, 2015).

Arsyad (dikutip oleh Bernadina, 2014) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perekonomian daerah (regional), dimana perekonomian daerah ini sendiri bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah. Akan tetapi kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kesenjangan ekonomi, akibat kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan, yang telah menyebabkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan, antar kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat. Realitas tersebut dapat kita lihat pada PDRB seluruh Provinsi di Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan Nasional.

Tabel 1.1
PDRB dan PDRB perkapita masing-masing Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015 (dalam Juta rupiah)

Provinsi	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	PDRB	PDRB/ kapita										
DKI Jakarta	1.075.183.481	111,53	1.147.558.226	117,67	1.296.694.573	123,96	1.296.694.573	130,06	1.373.389.129	136,31	1.454.345.823	142,87
Jawa Barat	906.685.760	20,97	965.622.061	21,98	1.093.543.546	23,04	1.093.543.546	24,12	1.149.216.057	24,97	1.207.083.406	25,84
Jawa Tengah	623.224.621	19,21	656.268.130	20,05	726.655.118	20,95	726.655.118	21,84	764.959.151	22,82	806.775.362	23,88
DI Yogyakarta	64.678.968	18,65	68.049.874	19,39	75.627.450	20,18	75.627.450	21,04	79.536.082	21,87	83.474.441	22,68
Jawa Timur	990.648.844	26,37	1.054.401.774	27,86	1.192.789.802	29,51	1.192.789.802	31,09	1.262.684.495	32,70	1.331.394.992	34,27
Banten	271.465.283	25,40	290.545.839	26,55	331.099.106	27,72	331.099.106	28,91	349.351.228	29,83	368.216.546	30,78

Sumber: BPS, diolah. (berbagai tahun)

Berdasarkan Tabel 1.1 baik PDRB maupun PDRB perkapita tiap provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2010 hingga 2015, yang mana dapat melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing provinsi. Secara urut Provinsi dengan PDRB ter-tinggi ke ter-rendah dari tahun ke tahun di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan yang terakhir adalah DI Yogyakarta.

PDRB perkapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berada pada daerah tersebut. Tahun 2010 hingga 2015 provinsi yang memiliki PDRB perkapita tertinggi ke provinsi dengan PDRB perkapita ter-rendah secara berturut-turut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan PDRB perkapita terendah setelah DI Yogyakarta. Dengan demikian, rendahnya PDRB maupun PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa mengindikasikan bahwa tingkat pembangunan dan kesejahteraan penduduk Jawa Tengah lebih rendah dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan PDRB rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Sebagai provinsi dengan PDRB dan PDRB perkapita yang rendah di Pulau Jawa sebagai pusat konsentrasi pembangunan di Indonesia, Jawa tengah menjadi daerah dalam penelitian tugas akhir saya.

Perlu diketahui faktor yang mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah itu sendiri masih

tertinggal dibandingkan dengan ke tiga Provinsi besar lainnya di Pulau Jawa. bagaimana posisi perekonomian masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga dapat mengetahui mengapa PDRB Provinsi Jawa Tengah tergolong rendah untuk tahun 2010 hingga 2015. Hal ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya yang cukup melimpah dan masih memungkinkan untuk diolah dengan lebih optimal, prasarana penunjang relatif sama dibanding dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa, bahkan letak geografis Provinsi Jawa Tengah berada di tengah yang dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Karena setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda merupakan salah satu penyebab ketimpangan pembangunan antar daerah yang berakibat kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang timpang antar daerah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan manusia yang menjadi ukuran tercapainya tujuan dilaksanakannya pembangunan. Provinsi Jawa Tengah meskipun merupakan daerah yang tergolong Provinsi dengan PDRB yang rendah, namun justru memiliki tingkat ketimpangan yang rendah antar kabupaten/kota menurut Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
DKI JAKARTA	0,36	0,44	0,42	0,43	0,43	0,43	0,42
JAWA BARAT	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40
JAWA TENGAH	0,34	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,38
DI YOGYAKARTA	0,41	0,4	0,43	0,44	0,42	0,43	0,42
JAWA TIMUR	0,34	0,37	0,36	0,36	0,37	0,42	0,37
BANTEN	0,42	0,4	0,39	0,4	0,4	0,4	0,40

Sumber: BPS, diolah. (berbagai tahun)

Menurut BPS (2017), koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Tabel 1.2 menjelaskan ketimpangan secara agregat yang terjadi 6 Provinsi di Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan. Angka gini ratio menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat pemerataan yang tinggi antar wilayahnya dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa setelah Jawa Timur. Dari tahun 2011 -2015 angka gini ratio untuk Provinsi Jawa Tengah cenderung tetap di angka 0,38.

Gambaran pola struktur pertumbuhan masing-masing wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota dapat diketahui menggunakan tipologi daerah yang dibagi dua indikator yaitu pendapatan per kapita daerah dan pertumbuhan daerah. Dapat pula digambarkan dengan Matriks Tipologi Klassen pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Matriks Tipologi Klassen

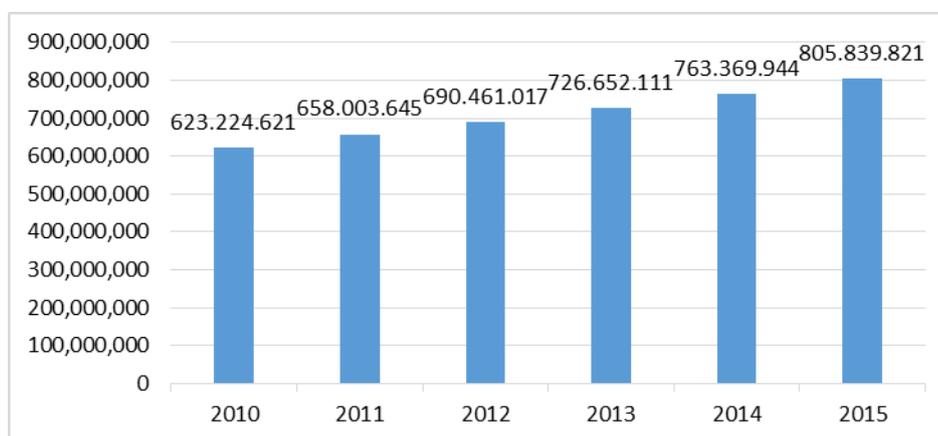
Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$Y_i < Y$	$Y_i > Y$
$r_i > r$	<i>High Growth but Low Income</i>	<i>High Growth and High Income</i>
$r_i < r$	<i>Low Growth but Low Income</i>	<i>High Income but Low Growth</i>

Sumber: Mudrajad Kuncoro (2004)

Menurut Kuncoro (2004), dapat dilakukan identifikasi posisi perekonomian melalui tipologi Klassen yang membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan tumbuh cepat (*high growth high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relative tertinggal (*low growth and low income*).

Dengan melihat posisi daerah yang berpotensi, diharapkan nantinya pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dengan tepat melakukan pembangunan daerahnya untuk dapat meningkatkan PDRB. Realitas kinerja perekonomian daerah dapat kita lihat dengan menggunakan PDRB. Grafik 1.2 total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2015, yang artinya terjadi peningkatan kinerja perekonomian dari tahun ke tahun pada periode 2010-2015.

Grafik 1.2
Total PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Atas
Dasar Harga Konstan 2010-2015 (dalam juta rupiah)



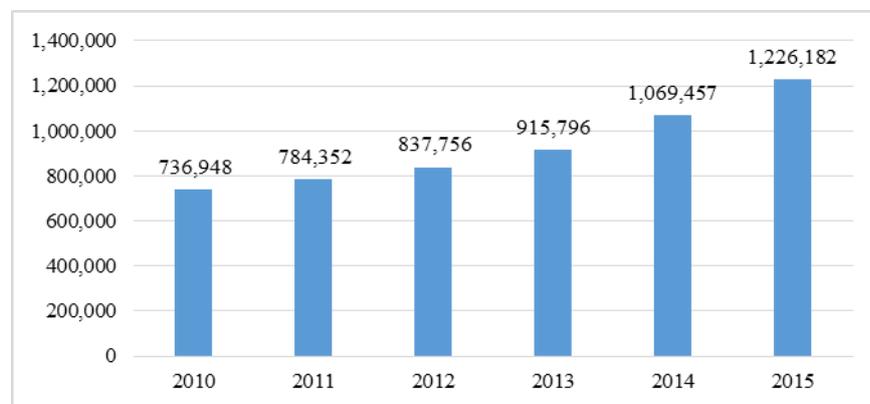
Sumber: BPS, diolah. (berbagai tahun, Lampiran A)

Dalam penelitian ini beberapa faktor yang akan di teliti dalam kemungkinan untuk mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah adalah upah minimum Kabupaten/Kota (UMK), belanja pemerintah daerah, investasi swasta, serta inflasi untuk setiap Kabupaten/Kota sebagai variabel independen. Salah satu tujuan penting dilakukannya pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja (Todaro, 2000). Menurut Lokiman, dkk (2014) salah satu faktor yang dapat menyerap tenaga kerja yaitu Upah minimum provinsi. UMK yang semakin tinggi merupakan salah satu hal yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu daerah (Bernadina, 2014).

Studi Waisgrais (dikutip oleh Sulistiawati, 2012), menemukan bahwa kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi di pasar tenaga kerja. Upah minimum memberikan

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, upah minimum juga dapat memberikan dampak terhadap pendapatan perkapita daerah sehingga mempengaruhi posisi perekonomian daerah tersebut.

Grafik 1.4
Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2015 (dalam rupiah)

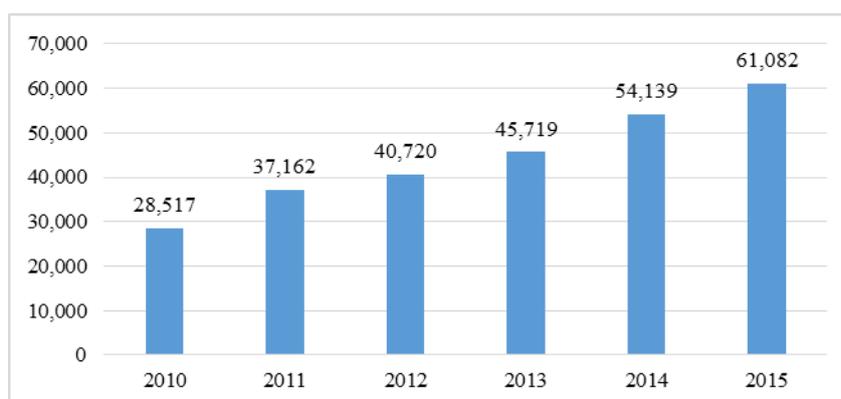


Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah. (berbagai tahun, Lampiran A)

Grafik 1.4 rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015, yang diartikan meningkat pula kesejahteraan pekerja karena dapat meningkatkan konsumsi serta tabungannya yang mana diharapkan dapat mendukung proses pembangunan daerah mengingat meningkatnya kesejahteraan maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja untuk menghasilkan output. Peningkatan tersebut terjadi secara sedikit demi sedikit, dan pada tahun 2014 untuk rata-rata UMK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah mencapai angka 1 juta rupiah.

Kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah, semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk (Rahman dan Chamelia, 2014). Menurut Sukirno (2000) belanja daerah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pembangunan ekonomi.

Grafik 1.3
Total Belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015 (dalam Miliar Rupiah)



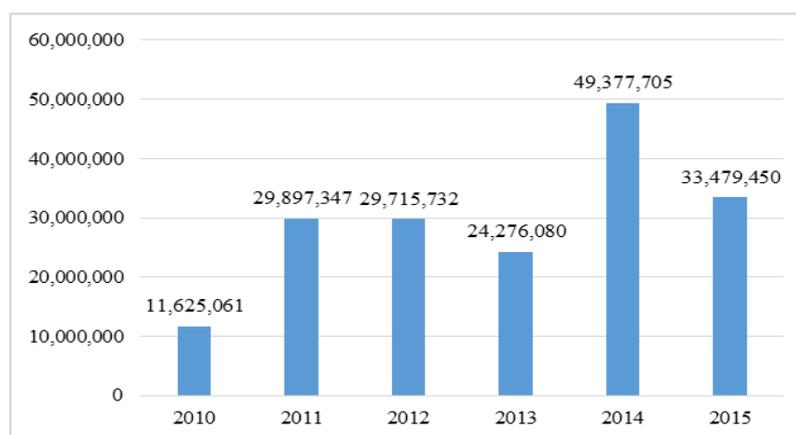
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah. (berbagai tahun, Lampiran A)

Mengingat PDRB Kabupaten/Kota masih tergolong rendah maka belanja pemerintah daerah merupakan salah satu komponen dalam APBD dianggap

mengambil peran penting dalam proses pembangunan Pada Grafik 1.3 total belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berarti pemerintah memberikan rangsangan yang semakin besar pula untuk tiap tahunnya terhadap perekonomian yang diharapkan dapat mendorong pembangunan.

Selain belanja pemerintah daerah, dan UMK yang dapat mempengaruhi PDRB adalah investasi swasta yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut Sukirno (2000), investasi di daerah memegang fungsi yaitu untuk menciptakan permintaan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dan untuk menambah kapasitas produksi dari daerah yang bersangkutan.

Grafik 1.5
Total Investasi Swasta Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015 (dalam Juta rupiah)



Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, nswi.go.id, diolah. (berbagai tahun, Lampiran A)

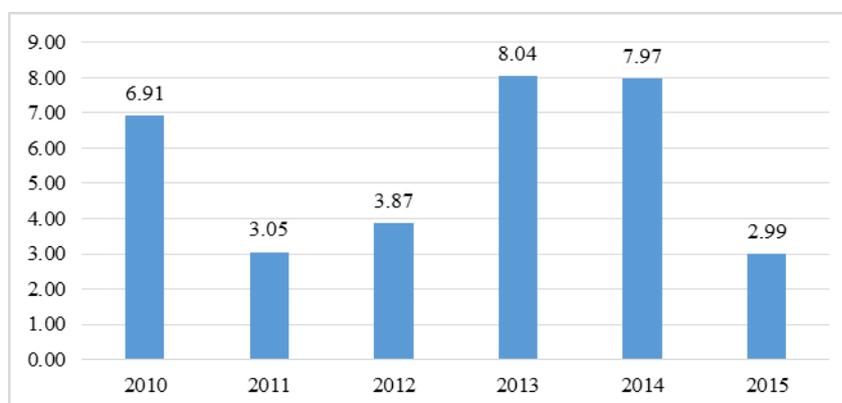
Situasi penanaman modal di tanah air, sebagaimana halnya keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, tak luput dari gejala ketidakmerataan. Dalam

Grafik 1.5 dapat kita lihat bagaimana total investasi swasta Kabupaten/Kota, terlihat terjadinya ketidakstabilan yang diperlihatkan dengan naik turunnya nilai total investasi seluruh Kabupaten/Kota. Jumlah investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh proyek yang sedang dilaksanakan di daerah tersebut, yang menyebabkan besaran investasi Kabupaten/Kota tersebut tidak stabil untuk tiap tahunnya.

Selanjutnya terdapat pula faktor eksogen yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, dan faktor eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi. Menurut Bank Indonesia (2017), inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Inflasi itu sendiri memiliki dampak positif dan negatif tergantung parah tidaknya inflasi. Apabila inflasi ringan yaitu masih kurang dari 10%, justru akan memberikan pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (Sukirno, 2013). Pada keadaan inflasi ringan upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah daripada inflasi. Sebagai akibatnya kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan penambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Untung yang lebih besar akan menggalakkan penambahan investasi. Sebaliknya, dalam keadaan inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (*hyperinflation*) keadaan perekonomian akan menjadi kacau dan lesu.

Grafik 1.6
Rata-rata Inflasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010-2015 (dalam persen)



Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah. (berbagai tahun, Lampiran A)

Grafik 1.6 rata-rata inflasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami naik turun. Namun seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih tergolong dalam inflasi ringan karena masih berada dibawah angka 10% pada tiap periodenya. Terutama pada tahun 2015, tingkat inflasi cenderung rendah yang diperlihatkan dengan rata-rata inflasi Kabupaten/Kota hanya sebesar 2,99%.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta empiris kondisi makro ekonomi, permasalahan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 adalah tergolong rendah, namun tingkat pemerataan antar Kabupaten/Kota tinggi. Serta perbedaan posisi perekonomian antar Kabupaten/Kota yang menggambarkan tingkat kemajuan wilayah yang bersangkutan. PDRB dan posisi perekonomian masing-masing Kabupaten/Kota tersebut dipengaruhi oleh UMK, Total Realisasi Belanja Pemerintah, Investasi swasta, serta inflasi.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis besarnya pengaruh faktor UMK, belanja pemerintah daerah, investasi swasta, serta inflasi terhadap PDRB.
- 2) Untuk mengetahui posisi perekonomian Kabupaten/Kota di dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010-2015 dengan menggunakan tipologi Klassen.
- 3) Untuk menganalisis besarnya pengaruh faktor UMK, belanja pemerintah daerah, investasi swasta, serta inflasi terhadap posisi perekonomian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai informasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan kebijakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tepat sasaran.
- 2) Memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi regional khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB dan posisi perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Dengan penelitian mengenai posisi perekonomian dan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan Pemerintah dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki posisi perekonomian tertinggal dan seharusnya mendapat perhatian lebih agar dapat memperbaiki posisi perekonomiannya dan PDRB dapat meningkat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, ruang lingkup pembahsan serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PDRB dan posisi perekonomian, dan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

BAB III menguraikan metode penelitian meliputi definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang mendukung.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV menguraikan hasil dan analisis yang terdiri dari deskripsi objek penelitian. Selain itu terdapat analisis data dan pembahasan mengenai PDRB dan posisi perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

BAB V: PENUTUP

BAB V menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian.